



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM  
MENERIMA  
AUDIENSI PERGERAKAN PELAUT INDONESIA  
SENIN, 7 MEI 2018**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Audiensi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 7 Mei 2018
Waktu	: Pukul 15.40 WIB – 16.05 WIB
Tempat	: Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Gedung Nusantara III DPR RI lt. 3
Acara	: Menerima Audiensi Pergerakan Pelaut Indonesia
Pimpinan Pertemuan	: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. ( Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	: Isnur Purwanto, S.I.P., M.M. Kabag Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	: Pergerakan Pelaut Indonesia Berikut daftar nama terlampir

**A. Pendahuluan**

Pada hari Kamis, 26 April 2018 pukul 15.40 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., menerima audiensi Pergerakan Pelaut Indonesia.

**B. Pokok-Pokok Pembicaraan**

1. Pergerakan Pelaut Indonesia Meminta kepada DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk segera memanggil Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Pelayaran (INSA), dan Organisasi Pelaut (PPI) guna membahas persoalan upah pelaut Indonesia yang bekerja didalam negeri, yang sampai detik ini belum memiliki standar pengupahan sektoral nasional dalam sebuah forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
2. Pergerakan Pelaut Indonesia Meminta kepada DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam segera memanggil BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (INSA), dan Organisasi Pelaut (PPI) untuk membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sangat jarang sekali pelaut menikmati program-program tersebut, karena masih banyak perusahaan-perusahaan pelayaran yang tidak menjalankan/mematuhi UU SJSN junto UU BPJS.

3. Pergerakan Pelaut Indonesia Meminta DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk turut serta mengawasi pemerintah dalam penerapan/implementasi UU No.15 Tahun 2016 tentang pengesahan *Maritime Labour Convention* (MLC), 2006 yang sejauh ini belum diterapkan secara maksimal di lapangan.
4. Pergerakan Pelaut Indonesia Meminta kepada DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk turut serta mendorong pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Pengerjaan di Bidang Perikanan agar pelaut perikanan Indonesia terlindungi di Luar Negeri.

### **C. Penutup**

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa akan mempelajari dan meneruskan aspirasi ini kepada Komisi terkait.
2. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa memang perlunya kejelasan data untuk memverifikasi kepada Kementerian terkait kejelasan WNI yang berlayar diluar negeri supaya ketika terjadi sesuatu terhadap mereka bisa langsung diketahui oleh negara.

Audiensi ditutup pukul 16.05 WIB

**a.n. Ketua Rapat,  
Sekretaris Rapat**



**Isnu Purwanto, S.I.P., M.M.**  
**NIP. 19620313 198203 1 001**